

No. 28 Vol 12 - 2005

JURNAL

HUKUM

IUS QUIA IUSTUM

HUKUM TATA NEGARA



SK DITJEN DIKTI NO. 52/DIKTI/KEP/2002

ISSN : 0854-8498

DAFTAR ISI

JURNAL HUKUM



PELINDUNG

Dekan Fakultas Hukum UII

KETUA PENGARAH

Nimatul Huda, S.H., M.Hum.

KETUA PENYUNTING

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.

DEWAN PENYUNTING

Prof. H. Dahlan Thab, S.H., M.Si.
Prof. Ernan Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.
Prof. Dr. H. Moh. Mahfud, MD, S.H., S.U.
Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum.
Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

PENYUNTING PELAKSANA

Siti Anisah, SH., M.Hum.
Riri Nazriyah, S.H., M.Hum.

MANAJER PENGEMBANGAN

TATA USAHA

M. Hasbi Ash Shiddiki, S.Pd

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Jl. Tamansiswa No. 158
Po. Box 1133 Telp. 379178 - 377043
Jur_hukum @ mailcity.com

ISSN : 0854-9498

No. Akreditasi: 52/Dikti/Kep/2002

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI	ii

TEMA UTAMA

◆ Relasi Kekuasaan Legislatif Dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945: Sistem Semi Presidensial Dalam Proyeksi Adnan Buyung Nasution	1
◆ Hakikat Pembukaan Dalam UUD 1945 Nimatul Huda	12
◆ Status Hukum Ketetapan MPR/RS Setelah Perubahan UUD 1945 R. Nazriyah	26
◆ Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Pasca Orde Baru Sri Hastuti P	46
◆ Upaya Menemukan Keseimbangan Hubungan Pusat Dan Daerah Sudi Fahmi	62
◆ Kebijakan Kriminalisasi Dalam Perda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Teguh Prasetyo	77
◆ Kaji Ulang Pelaksanaan JAMSOSTEK Menurut UU. No. 3 Tahun 1992 Di PT TELKOM DIVRE III Bandung Jum Anggriani	96

TEMA LEPAS

◆ Pertanggungjawaban Negara Dalam Kegiatan Komersial Ruang Angkasa Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Swasta Sri Wartini	116
◆ Pengaturan Perdagangan Jasa Internasional Dalam GATS/WTO Setriani	129
◆ Women's Right In The Islamic Family Law Of Indonesia Khoiruddin Nasution	147

JURNAL HUKUM Caturwulan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, dan artikel konseptual resensi buku, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya. Tulisan di luar dosen UII yang dimuat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Dari Redaksi

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum wr.wb.

Kehidupan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi dan Perubahan UUD 1945 telah memberikan warna yang dinamis dalam ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 yang dulu di masa Orba 'disakralkan' telah mengalami perubahan yang sangat fundamental. Hasil Perubahan UUD 1945 pun banyak mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam bidang ketatanegaraan, misalnya, pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, dan demokratisasi.

Salah satu kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945 yakni tidak merubah Pembukaan UUD 1945, karena hakikat Pembukaan UUD merupakan kaidah fundamental negara. Perubahan lainnya berkaitan dengan relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selama ini, UUD 1945 bernuansa *executive heavy*. Dominasi kekuasaan eksekutif dalam UUD 1945 terlihat setidaknya pada Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Konsekuensi pengaturan yang demikian itu menyebabkan masuknya 'intervensi' kekuasaan eksekutif ke dalam semua kelembagaan negara. Setelah dilakukan perubahan UUD 1945, bukannya terjadi keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi kekuasaan negara justru bergeser ke arah penguatan legislatif atau biasa disebut *legislative heavy*.

Salah satu konsekuensi logis dari Perubahan UUD 1945, adanya perubahan kelembagaan negara, termasuk di dalamnya adalah MPR. Melalui perubahan tersebut MPR telah mendekonstruksi dirinya menjadi parlemen *soft bicameral* atau bahkan ada yang menyebutnya *inkameral*. Akibat dari perubahan struktur dan kelembagaan MPR tersebut, dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPR/S. Hal itu dilakukan karena telah ada kesepakatan untuk menghapuskan Ketetapan MPR/S sebagai sumber hukum di Indonesia.

Jurnal Hukum edisi kali ini akan mengentengahkan berbagai persoalan aktual di bidang hukum ketatanegaraan yang muncul pasca amandemen sebagai tema utama, serta beberapa persoalan hukum lain yang menarik untuk disimak sebagai artikel lepas.

Akhirnya, kami atas nama redaksi Jurnal Hukum berharap mudah-mudahan lontaran ide dan analisis yang ingin diwacanakan dalam jurnal ini dapat bermanfaat dan menambah minat pembaca untuk lebih mendalami berbagai persoalan tersebut. Amin.

Billahitaufiq wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Redaksi